

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Media saat ini tampil sebagai jembatan informasi terhadap masyarakat, media juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan berdemokrasi. Bahkan media saat ini dapat dikatakan menjadi pilar utama dalam berdemokrasi. Lebih jauh media saat ini telah mampu mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap wacana yang berkembang melalui penyajian beritanya. Media juga dapat berfungsi untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat apabila terjadi penyimpangan dalam pengimplementasiannya, seperti korupsi, suap dll. Peran dan fungsi media yang semakin kuat ini telah membawa media sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Junaedi, 2007 : 14).

Kasus suap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu berita yang cukup besar di Indonesia, selain beberapa kasus nasional lainnya seperti kasus Hambalang dan Century yang sudah lama tidak berkesudahan. Perkembangan kasus suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ini kian hari kian memanas. Kasus ini berawal dari rencana penyuapan yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seorang pengusaha terhadap Akil Mochtar.

Kasus ini terungkap ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas di Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan pada hari Rabu 2 Oktober 2013. Akil Mochtar ditangkap bersama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Tengah Chairun Nisa dan seorang pengusaha yang bernama Cornelis Nalau. Penangkapan itu dilakukan sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah penangkapan di Widya Chandra tim Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap dua orang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Keduanya adalah Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan seorang lagi berinisial DH. Dalam operasi tersebut tim Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang dollar Singapura yang bernilai Rp. 2-3 miliar yang diduga akan digunakan untuk melakukan penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar berkaitan dengan sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak Banten. Setelah melakukan penangkapan tersebut akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dugaan suap pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak Banten (Muhammad Rizki, KPK Bongkar Jaringan Suap Akil, Tempo, 4 Oktober 2012).

Setelah penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2013 KPK menggeledah ruang kerja Akil Mochtar. Dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok di ruang

beritanya. KPK telah membatalkan penangkapan terhadap Akil Mochtar dan Chairun Nisa.

Konstitusi untuk kemudian ditindak lanjuti. Setelah itu BNN diberi kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap narkoba yang ditemukan di ruang kerja Akil Mochtar tersebut, BNN menyatakan narkoba tersebut adalah jenis ganja dan metamfetamin dalam bentuk tablet.

(<http://nasional.kompas.com/read/2013/10/08/1823063/BNN.Ungkap.Narkoba.di.Ruang.Akil.Mochtar>. diakses 7 april 2013)

Pada tanggal 5 Oktober 2013, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berinisiatif membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur proses perekrutan dan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.

*"Saya berencana mempersiapkan Perpu untuk saya ajukan ke DPR yang antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme dan seleksi hakim MK. Ini penting."*

(<http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-akil-sby-siapkan-perpu-rekrutmen-dan-pengawasan-hakim-mk.html>. diakses 7 April 2013)

Usulan perpu tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2013 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Joko Suyanto saat jumpa pers di Gedung Agung, atau Istana Yogyakarta mengumumkan bahwa perpu tersebut telah ditandatangani oleh Presiden.

(<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-10-18/presiden-sby-terbitkan-perpu-mk/1206474>. diakses 7 April 2013)

Perkembangan kasus suap di Mahkamah Konstitusi ini dari waktu ke waktu pasti tidak terlepas dari peranan media yang selalu memantau dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus tersebut. Melalui media juga, masyarakat akhirnya mengetahui seluk beluk kasus ini yang sebelumnya tidak terungkap ke publik. Dalam pemberitaan kasus ini, setiap media memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikatakan setiap media membentuk opininya masing-masing. Media sebagai penyampai pesan kepada masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik atau persepsi masyarakat terhadap sebuah kasus/kejadian.

Di antara sekian banyak media yang rutin mengikuti perkembangan dan selalu *update* untuk memberitakannya kepada khalayak adalah dua surat kabar terkemuka di Indonesia, yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Pemberitaan Kasus Suap Mahkamah Konstitusi**

**Di Harian Kompas dan Koran Tempo**

<b>Edisi</b>	<b>Harian Kompas</b>	<b>Koran Tempo</b>
3 Okt 2013	a. KPK Bongkar Jaringan Suap Akil	a. KPK Tangkap Tangan Ketua Mahkamah Konstitusi
4 Okt 2013	a. SBY Puji Langkah KPK Tangkap Akil Mochtar	a. Nama MK Dihancurkan Oleh Pak Akil

		b. Nasib Akil Ditangan Majelis Kehormatan
6 Okt 2013	a. Akil Bantah Cuci Uang Lewat Ratu	
7 Okt 2013		a. Akil Mochtar Dipantau Sejak 2010 b. Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu c. Akil Terancam Dipecat Terkait Temuan Narkoba
8 Okt 2013	a. MK Juga Meminta BNN Memproses Hukum Akil b. Akil Diduga Cuci Uang c. Banyak Yang Tolak Perpu	a. Obat SBY Untuk MK b. Saksi yang Diduga Tampung Duit Akil Mangkir
11 Okt 2013	a. Akil Bersedia Diperiksa MKK	a. Modus Adik Atut Mirip Nazar b. Terima Rp 100 Miliar, Kantor Perusahaan Akil Sepi
18 Okt 2013	a. Akil dimintai Keterangan di KPK b. Perpu MK Diterbitkan “ Presiden Usulkan Hakim	a. Kerisauan Iringi Terbitnya Perpu MK

	Konstitusi Harus Jeda 7 Tahun dari Parpol” c. Skandal Suap MK : Atut ke RS Mount Elizabeth atau JW Marriott?	
19 Okt 2013		a. Akil Jadi Tersangka Untuk Kasus Baru b. Fraksi di DPR Terbelah Soal Perpu MK
21 Okt 2013	a. Bersaing Selamatkan MK	
23 Okt 2013	a. Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah	

Dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 Harian Kompas memberitakan kasus ini sebanyak 12 kali, sedangkan Koran Tempo memberitakan kasus ini sebanyak 13 kali.

Kasus suap di Mahkamah Konstitusi ini menarik untuk diangkat karena kasus ini adalah kasus yang tergolong besar, karena orang-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah orang yang cukup berpengaruh dan mempunyai jabatan di negeri

... Kasus ini menarik untuk diangkat karena kasus ini adalah kasus yang tergolong besar, karena orang-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah orang yang cukup berpengaruh dan mempunyai jabatan di negeri

penerbitan Perppu MK oleh Presiden, rencana ini menimbulkan kontroversi di berbagai pihak, kontroversi tersebut tidak luput dari pemberitaan oleh media massa.

Dalam memberitakan kasus ini, setiap media memiliki cara pandangnya masing-masing. Begitu juga dengan Harian Kompas dan Koran Tempo. Berita pada Harian Kompas edisi 8 Oktober 2013, judul yang diberitakan berbunyi "*Banyak yang Tolak Perppu*", yang isinya adalah penolakan perpu oleh sejumlah fraksi di DPR, sedangkan pada Koran Tempo edisi 7 Oktober 2013, judul yang diberitakan berbunyi "*Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu*" yang isi beritanya adalah para tokoh Mahkamah Konstitusi yang menolak adanya perpu. Harian Kompas dan Koran Tempo memberitakan topik yang sama yaitu perpu MK, akan tetapi mereka memberitakannya dengan berbeda, berita pada Harian Kompas memberitakan bahwa penolakan dilakukan oleh sejumlah Fraksi di DPR sedangkan pada Koran Tempo memberitakan bahwa penolakan dilakukan oleh sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi.

Pada pemberitaan tersebut Harian Kompas dan Koran Tempo juga meminta komentar dari beberapa narasumber. Harian Kompas menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin sebagai narasumber. Amir mengatakan bahwa perpu tersebut memang perlu diterbitkan.

.....penerbitan perppu sangatlah tepat untuk mengatasi tragedi hukum terkait penangkapan ketua MK. "Presiden punya kewenangan untuk

Sedangkan Koran Tempo menjadikan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie. Jimly mengatakan bahwa dia tidak setuju atas penerbitan perpu karena akan mengebiri Mahkamah Konstitusi.

.....kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi tidak sesuai dengan pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dalam putusan bernomor 005/PUU-IV/2006 itu dinyatakan bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi, sudah tidak berlaku lagi. (Tempo edisi 7 Oktober 2013)

Amir Syamsudin di pemberitaan Harian Kompas menjelaskan bahwa perpu perlu diterbitkan, sedangkan Jimly Asshidiqqie pada pemberitaan di Koran Tempo menjelaskan bahwa perpu tidak perlu diterbitkan karena itu sama saja mengebiri Mahkamah Konstitusi.



Gambar 1.1

Berita "Banyak yang Tolak Perppu" di Harian Kompas

LITIK & HUKUM

KOMPAS, SELASA, 8 OKTOBER 2012

Banyak yang Tolak Perppu

Perbaiki Sistem di Mahkamah Konstitusi Dirasakan Lebih Tepat

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi banyak mendapat penolakan, baik dari sejumlah fraksi di DPR maupun ahli tata negara.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan di Badan Legislatif DPR Arif Wibowo, misalnya, menilai rencana tersebut bertentangan dengan konstitusi.

"MK itu lembaga negara yang kewenangannya dapat dan diatur konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Maka tidak boleh diatur dalam perppu," ujarnya Senin (7/10).

Rencana Presiden Yudhoyono menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tersebut disampaikan 6 Oktober lalu saat menyampaikan lima agenda dan agenda penyelesaian MK.

Menurut Arif, langkah yang seharusnya dilakukan adalah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menproses peradilan Ketua MK non-aktif, Abd. Mochtar, Majelis

Adalah menurut Arif, adalah memangkas kewenangan MK, terutama kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum, kepala daerah. Namun hal itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 48/2009 tentang Kekayaan Kekayaan.

Usulan perancangan kewenangan juga disampaikan anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding. Dia mengusulkan penguatan sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, terutama untuk pilkada kabupaten atau kota.

Sekarang kebetulan sedang ada pembahasan RUU Pilkada. Jadi, pengalihan kewenangan penguatan sengketa pilkada ke MA bisa dimasukkan ke sana," ujarnya. Ketua Fraksi Partai Hanura, itu menjelaskan, fraksinya akan menindaklanjuti ke Panglima

dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengesalkan penerbitan perppu angatan tepat untuk mengatasi masalah hukum terkait penyelenggaraan KPU MK.

"Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan perppu dalam kondisi tertentu," kata Amir.

Menurut Amir, pengawasan terhadap MK harus dipertahankan. "Bagaimana mungkin ada satu lembaga yang tidak boleh diawasi? Selama ini hakim-hakim lain (hakim MA) juga dapat diawasi oleh Komisi Yudisial," ujarnya.

Perbaiki sistem internal

Pengamat hukum tata negara, Andi Trimanaputra Salsin, mengungkapkan, belakangan Ketua MK Akil Mochtar memperlihatkan virus korupsi telah menggerogoti semua lembaga pemerintahan, termasuk lembaga hukum yang semestinya memelopori gerakan antikorupsi.

Maraknya kasus korupsi ini memperlihatkan, pengawasan lemah sehingga pejabat memperoleh peluang untuk menyimpangkan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Karena itu, semua pihak perlu mengevaluasi

lembaga, korupt, atau badan pemerintah.

"Kita harus membangun sistem pencegahan korupsi sejak dini. Pejabat yang terindikasi harus dialihgunakan kekuasaannya harus langsung diungkitkan dan diberhentikan. Jangan tunggu sampai terjadi korupsi baru kemudian ditindak. Perkuat gerakan mencegah korupsi," katanya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oes Madril mengingatkan, sudah menderok ritak segera memperbaiki juga perekrutan hakim konstitusi.

Pada ada aturan mekanisme pemilihan hakim yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif di lingkungan MA. DPR dan presiden "intipenting agar bisa menemukan sosok-sosok berkualitas," ujarnya.

Komis Yudisial juga bisa diminta untuk mengawasi perilaku hakim bukan putusan MK. "Jika ada dugaan pelanggaran kode etik MK dan KY bisa membentuk majelis kehormatan hakim," katanya.

(JIL/ATA/RYO/ANA/ILG/IAM)



Lihat Video Terkait "Akil Mengundurkan Diri" di vod.kompas.com

Gambar 1.2

Berita "Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu" di Koran Tempo

BERITA UTAMA

KORAN TEMPO  
SENIN, 7 OKTOBER 2013 | A2

# Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu

"Pisahkan pribadi dan institusi. Saya mendukung Akil diberi hukuman mati."

JAKARTA — Sejumlah tokoh Mahkamah Konstitusi menolak rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) perihal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi. Soalnya, menurut Harjono, hakim konstitusi yang juga Ketua Majelis Kehormatan pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. "Jika tetap ingin mengawasi Komisi Yudisial mengenai putusan secara konstitusional," ujar dia saat dihubungi kemarin.

Perpu itu bermula dari ditangkanya bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Oktober lalu. Akil diduga menerima suap dalam

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Lebak, Banten.

Pada penangkapan dua hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat bersama sejumlah pemimpin lembaga legislatif, termasuk Komisi Yudisial, untuk membahas soal Perpu. Menurut Presiden, pengawasan terhadap hakim konstitusi selama ini hanya bisa dilakukan majelis kehormatan setelah adanya dugaan pelanggaran. Pada masa mendatang pengawasan hakim konstitusi dilakukan sebagaimana pengawasan terhadap hakim lainnya. "Diharapkan Perpu ini tidak dibatalkan melalui *judicial review* atau uji materi di MK," kata Presiden.

Harjono menyalkan rencana menerbitkan Perpu tersebut karena Mahkamah

menyatakan Akil adalah kasus pribadi, bukan berkaitan dengan institusi.

Penolakan juga diungkapkan Jinty Assudibigie, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama ini, penerbitan Perpu merupakan upaya menggebit Mahkamah "Masyarakat memang marah karena kasus Akil, tapi jangan memburya institusi dan malah mengganggu tugasnya," ujar dia saat dihubungi. "Pisahkan pribadi dan institusi. Saya juga mendukung Akil untuk diberi hukuman mati."

Jinty menjelaskan, kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dalam putusan berpomor 005/PUU-IV/2006 itu dinyatakan

Undang Komisi Yudisial sepanjang menyangkut kata hakara konstitusi, sudah tidak berlaku lagi. Di situ semuanya jelas," ujar Jinty, yang saat itu menjadi ketua majelis konstitusi dalam memutuskan pasal tersebut. "Inipasti ada motif inkonstitusional."

Ahli hukum tata negara Yusuf Ihsa Mahendra menilai sebaliknya. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi memang berwenang menguji undang-undang termasuk menguji undang-undang yang mengatur dirinya, karena diberi UUD 1945. Namun, menurut dia, Mahkamah harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaganya sendiri. "Itu tidak etis," kata Yusuf. "Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim konstitusi."

● SELESAI

Kedua koran tersebut memberitakan kasus yang sama yaitu rencana penerbitan Perppu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, akan tetapi mereka memberitakannya dengan berbeda. Harian Kompas memberitakan bahwa Perpu tersebut baik dan memang perlu diterbitkan, sedangkan Koran Tempo memberitakan bahwa Perpu MK tersebut tidak baik dan tidak perlu diterbitkan. Perbedaan-perbedaan yang muncul, baik pada *lead*, tubuh berita, dan judul merupakan konsekuensi dari adanya *frame* atau pembingkaiian yang berbeda oleh masing-masing media ketika menyajikan satu fakta yang sama dalam sebuah berita. Hal tersebutlah yang kemudian dapat diteliti dengan menggunakan analisis *framing* (bingkai). Analisis *framing* berkaitan dengan opini publik. Sebuah berita dengan bingkai tertentu dapat menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda-beda. Penelitian dengan menggunakan metode analisis *framing* dilakukan agar khalayak mengetahui bagaimana proses sebuah berita dikonstruksi sebelum dibaca oleh khalayak.

Pada riset serupa terdahulu yang pernah dilakukan oleh Muhammad Syarifudin Fajri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Kontroversi Padi Supertoy HL-2 Pada Penerbitan Media Massa* pada kedua media yang sama yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo pada 2011 silam, menyebutkan bahwa Harian Kompas cenderung kurang berani dalam memberitakannya. Hal ini berbeda dengan Koran Tempo yang memuat berita tersebut secara lebih terang-

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dapat dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002 : 10). Pada intinya, analisis *framing* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui cara media dalam menyeleksi, membingkai, dan mengkonstruksi sebuah berita. Dari perbedaan pemberitaan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pembingkaiian (*framing*) berita rencana penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada Harian Kompas dan Koran Tempo.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pemberitaan rencana penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dibingkai (*framing*) oleh media cetak Harian Kompas dan Koran Tempo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemberitaan rencana penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat menambah khazanah bagi studi ilmu komunikasi, khususnya pada ranah kajian teks media.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan di bidang ilmu komunikasi, yang berkaitan dengan konstruksi berita dalam media massa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian tentang teks media yang menggunakan analisis *framing* dengan sudut pandang konstruksionis.
- d. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bingkai (*frame*) yang digunakan oleh Harian Kompas dan Koran Tempo dalam memberitakan rencana penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

### 2. Manfaat praktis

Untuk khalayak dan pembaca berita :

- a. Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak tentang apa dan bagaimana proses pembingkaiian dilakukan oleh sebuah media.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran khalayak untuk memahami bagaimana sebuah proses sebuah berita sampai kepada pembaca, sehingga lebih kritis terhadap pemberitaan media.

## **E. Kajian Teori**

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian, yaitu :

### **1. Konstruksi Sosial dalam Media Massa**

Media massa menurut Dennis McQuail (dalam Junaedi, 2007 : 14) dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang singkat. Lebih jauh lagi media menjadi penghubung yang membuat semua individu-individu seperti berada dalam sebuah lingkungan yang terintegrasi, dengan kata lain media dapat dipahami sebagai saluran yang seolah-olah dapat menghilangkan jarak antara khalayak dengan realitas yang terjadi di seluruh dunia (Junaedi, 2007 : 14).

Melalui media massa, seseorang maupun kelompok tertentu dapat memosisikan dirinya untuk mencapai tujuan yang hendak diraih, sehingga dalam kenyataannya media bukanlah sebuah saluran yang netral karena setiap kelompok dapat menampilkan kekuatan dan pengaruhnya dalam masyarakat secara apa adanya. Media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihaknya. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pendapat Bannet (dalam Eriyanto, 2007 : 36) bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media menyajikan sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran, dan manusia menjadi aktor utama yang mempengaruhinya karena dalam konstruksi terhadap realitas yang dibentuk terdapat pengaruh kesadaran mental

masing-masing individu didalamnya juga ikut serta pengalaman-pengalaman sosial, pengetahuan, dan ideologi.

Menurut Saussure dalam (Sobur, 2006 : 87) persepsi dan pandangan manusia tentang realitas dikonstruksi oleh kata dan tanda-tanda lain oleh konteks sosial. Tanda juga membentuk persepsi manusia dan lebih dari merefleksi realitas yang terjadi. Hal senada juga dikemukakan oleh Paul Walson, salah seorang pendiri Greenpeace, tentang perilaku media massa. Menurutnya kebenaran yang dimuat oleh media massa bukanlah kebenaran yang sesungguhnya atau sejati karena kebenaran telah ditentukan oleh media itu sendiri.

Terdapat dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis, karakteristik tersebut adalah :

- a. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukan merupakan sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.
- b. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator dan dalam sisi penerima ia

Pesan dipandang bukan sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta apa adanya. Dalam menyampaikan pesan seseorang menyusun citra tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. Seorang komunikator dengan realitas yang ada akan menampilkan fakta tertentu pada komunikan, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, dan pengetahuannya sendiri (Eriyanto, 2002 : 40).

Menurut pandangan konstruksionis, sebuah teks berita tidak bisa disamakan dengan menggandakan realitas tetapi harus dipandang sebagai konstruksi atau realitas. Oleh sebab itu, saat peristiwa yang sama terjadi, bisa jadi cara konstruksinya berbeda, karena setiap wartawan memiliki penafsiran atau konsep yang berbeda dalam memaknai suatu peristiwa. Secara umum pendekatan konstruksionis memiliki penilaian tersendiri untuk fakta, media, berita dan wartawan. Pada dasarnya media seharusnya menyampaikan dan menyebarkan realitas sosial kepada masyarakat, sesuatu yang bebas dan tanpa tekanan. Dengan demikian, media tidak bisa dianggap berwajah netral dalam memberikan jasa informasi dan berita kepada khalayaknya. Lebih dari itu, sajian berita dan informasi dapat dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna sebuah realitas media memiliki kemampuan tertentu dalam menciptakan citra suatu realitas. Isi media merupakan lokasi atau forum yang menampilkan berbagai peristiwa. (Syahputra, 2006 : 32)



## 2. Berita dan Proses Produksinya

Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari kata *journal*. Artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau juga bisa berarti surat kabar. *Journal* berasal dari kata latin *diournalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik (Kusumaningrat dkk, 2005 : 15). Pekerjaan jurnalistik sendiri yaitu melakukan peliputan atau peristiwa yang kemudian ditulis menjadi sebuah berita.

Berita adalah sebuah kata yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang sering mengikuti informasi. Hampir setiap hari semua media massa baik cetak maupun elektronik menyajikan berbagai macam berita untuk dinikmati oleh masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai berita menurut beberapa tokoh jurnalis, antara lain :

- a. Paul D. Maessenner dalam bukunya *Here's the News*, *news* adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik minat. Berita radio dapat pula berarti, apa yang terjadi saat ini, apa yang segera terjadi dan apa yang akan terjadi.
- b. Prof. Mitchel V. Charnley dalam bukunya *Reporting*, *news* adalah laporan tentang fakta dan opini yang menarik perhatian dan penting, yang dibutuhkan masyarakat. James M Neal dan Mitchel V Charnley mengartikan berita sebagai laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan suatu kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih

- c. Curtis Beckmann, Post President RTNDA. Berita diartikan sebagai laporan atas opini atau peristiwa yang penting bagi sejumlah besar khalayak. Berita yang besar adalah liputan opini atau peristiwa yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak.
- d. The New Grolier Webster International Dictionary. Berita adalah, (1) informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, (2) informasi yang disajikan oleh media massa, (3) sesuatu atau orang sebagai subjek yang layak diberitakan oleh media (Syahputra, 2006 : 20-21).

Dalam definisi yang singkat, berita dapat diartikan sebagai laporan dari sebuah peristiwa atau kejadian. Berita setidaknya mengandung unsur 5 W + 1 H, yaitu yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *when* (kapan), *where* (dimana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana) agar unsur informasi di dalam berita tersebut dapat dipenuhi (Faqih, 2001 : 44).

Di dalam media massa, sebuah berita tidak hanya sebagai informasi, namun juga sebagai produk seorang wartawan dalam sebuah media. Berita harus berdasarkan fakta. Namun pengungkapan fakta bisa dengan beragam jenis berita. Faqih dalam bukunya yang berjudul 'Dasar – Dasar Jurnalistik' (2001 : 42-43)

..... dalam pengungkapan fakta di media

- a. *Straight News* atau berita langsung, dalam perkembangannya kemudian sering hanya disebut berita. *Straight news* dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus segera diketahui masyarakat. Hal yang paling penting dalam *straight news* adalah aktualitas, karena persaingan media, fakta harus secepat mungkin dipublikasikan, jika terlambat sudah tidak aktual lagi (karena mungkin telah dimuat di media lain).
- b. *Soft News* atau berita ringan, jenis ini tidak mengutamakan aktualitas, tapi menekankan aspek manusiawi (*human Interest*) dalam suatu peristiwa. hal yang perlu diperhatikan dalam *soft news*, penulis tidak perlu mengungkapkan secara detail, cukup hanya permukaan saja.
- c. *Feature*, berita kisah, khas. Merupakan jenis tulisan mengenai suatu fakta yang dapat menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh perasaan pembaca. Jenis berita ini tidak terpengaruh pada unsur aktualitas, yang diutamakan adalah detail suatu fakta. Unsur terpenting dalam penulisan *feature* adalah sisi manusiawi. *Feature* tidak melulu mengenai orang, tapi juga bisa mengenai peristiwa, atau tempat. Bahasa yang digunakan dikemas agar segar, ringan, dan menarik. *Feature* juga sering disebut berita kisah, karena gaya penulisannya yang naratif, seperti orang bertutur atau bercerita (Faqih, 2001 : 42-43).

Klasifikasi berita ini dimaksudkan untuk mempermudah seorang wartawan di dalam mengelompokkan sebuah berita. Wartawan memiliki kuasa penuh terhadap kategori apa yang akan mereka pakai didalam membedakan jenis berita dan subjek peristiwa sesuai dengan nilai berita yang dimiliki.

Nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan. Setiap hari ada jutaan peristiwa, dan jutaan peristiwa itu potensial untuk menjadi sebuah berita. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk memilah-milah peristiwa ini oleh wartawan adalah ukuran profesional yang dinamakan nilai berita. Secara umum nilai berita tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. *Proximity*, merujuk pada aspek kedekatan. Dalam menuliskan berita, seorang jurnalis akan memperhatikan aspek kedekatan peristiwa yang ditulisnya dengan pembaca. Aspek ini mempunyai dua dimensi, geografis dan psikologis. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Kaliurang misalnya, dan dimuat oleh Kedaulatan Rakyat maka mempunyai aspek kedekatan geografis, namun jika seorang warga Yogyakarta sukses berjualan gudeg di Belanda dan dimuat oleh Kedaulatan Rakyat di halaman pertama, maka ia mempunyai aspek kedekatan psikologis.
- b. *Actuality, actuality* ini juga mempunyai dua dimensi, yakni objektif dan subjektif. Aktualitas objektif merujuk pada peristiwa aktual yang terjadi

diberitakan merupakan peristiwa masa lampau yang diberi konteks sekarang. Perang Kemerdekaan, misalnya yang diberitakan kembali ketika HUT kemerdekaan menjadi contohnya.

c. *Human Interest*, dimensi ini merujuk pada hal-hal yang menyentuh dimensi kemanusiaan.

d. *Magnitude*, peristiwa yang diberitakan berhubungan dengan sesuatu yang besar. Gempa bumi atau gunung meletus merupakan contoh peristiwa yang mempunyai *magnitude* besar.

e. *Prominance*, menyangkut keterkenalan. Ini bisa berupa orang ataupun benda atau tempat. Hamengku Buwono IX ke kantor menggunakan sepeda mempunyai nilai *prominance* karena menyangkut orang yang dikenal luas oleh masyarakat (Adiputro, 2009 : 130).

Sebuah berita hingga siap menjadi berita yang siap diberitakan kepada pembaca, melewati berbagai macam proses terlebih dahulu. Dimulai dengan penyeleksian apakah sebuah peristiwa atau kejadian itu layak untuk diberitakan, selanjutnya maka wartawan akan mengumpulkan data dan fakta terkait berita yang akan ditulis.

Setelah data terkumpul maka wartawan akan menyusunnya menjadi sebuah laporan berita, yang bisa berbentuk berita langsung, reportase ataupun *feature*.

6.1.4. Tahap-tahap proses penyuntingan oleh masing-masing redaktur sesuai



- b. Tahap kedua, adanya media cetak dalam bentuk koran. Koran mampu menyajikan informasi terkini secara cepat dan instan, berbeda dengan buku yang terbit tidak teratur dan lebih cenderung menyajikan isi yang berat.
- c. Tahap ketiga, penemuan film melalui pita seluloid. Jika perspektif lama melihat film hanya dalam fungsinya sebagai media hiburan, maka perspektif baru dalam kajian komunikasi massa melihat bahwa film bukan hanya sebuah mekanisme hiburan, namun film dianggap sebagai sebuah media massa yang mampu menjangkau khalayak yang jauh lebih luas, bahkan sampai di wilayah pedesaan.
- d. Tahap keempat, penemuan teknologi penyiaran melalui media televisi dan radio. Tahap ini dicirikan oleh cakupannya yang luas, teknologi audio visual, pelibatan teknologi dan organisasi media yang lebih kompleks serta isi yang semakin beragam.
- e. Tahap kelima, perkembangan rekaman musik. Awalnya dalam bentuk phonogram, namun kemudian beralih ke pita kaset dan saat ini didominasi oleh cakram digital.
- f. Tahap keenam, penemuan internet yang memungkinkan interkoneksi di antara pemakainya. Jika kelima tahap sebelumnya dapat dengan mudah dikontrol oleh negara, maka pada tahap terakhir ini kontrol negara menjadi semakin susah (McQuail dalam Junaedi, 2007 : 27-29).

Setiap harinya media massa memuat berita. Namun seringkali berita yang dimuat oleh media massa tidaklah mencerminkan realitas yang sesungguhnya, namun sudah tercampur dengan pandangan wartawan saat meliput dan membuat laporan sebuah berita. Padahal media berperan besar untuk mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Pada dasarnya pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Isi media adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan bagaimana realitas yang dipilihnya (Hamad, 2004 : 11).

Dari beberapa media yang termasuk dalam kategori media massa, salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar merupakan media cetak yang tergolong populer di kalangan masyarakat. Dalam kamus komunikasi, surat kabar diartikan sebagai lembaran cetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan memiliki ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya teraktual mengenai apa saja yang terjadi diseluruh dunia, dan mengandung nilai untuk diketahui oleh khalayak pembaca.

Surat kabar yang kali pertama terbit di Indonesia adalah *Bataviasche Nouvellesen Politique Raisonmementes*. Sebagai bagian dari organ pemerintah Belanda, surat kabar yang terbit tahun 1745 ini lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial. Pada tahun 1855, terbitlah surat kabar berbahasa non



massa adalah sebagai ruang publik, yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Hill (dalam Syahputra, 2006) menjelaskan media massa di Indonesia merupakan forum untuk mengekspresikan aspirasi nasionalisme dan agitasi politik (Syahputra, 2006 : 3).

Media massa sebagai alat untuk berkomunikasi massa tentu tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan, begitu juga dengan surat kabar, surat kabar juga tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, antara lain :

a. Kelebihan surat kabar

- 1) *Market Coverage*, dapat menjangkau sampai ke daerah – daerah
- 2) *Catalog Value*, menyangkut sebuah kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi barang
- 3) *Positive Consumer Attitudes*, konsumen memandang surat kabar memuat hal-hal yang aktual yang perlu diketahui segera oleh pembacanya
- 4) Mengutamakan pesan – pesan yang bersifat visual, tertulis, gambar, foto dengan warna dan tata letak yang khusus (Rumanti, 2002 : 125).

b. Kekurangan surat kabar

- 1) *Short Life Span*, sekalipun jangkauannya luas, surat kabar dibaca dalam waktu yang singkat dan biasanya sekali dibaca dan dinilai

- 2) *Clutter*, isi yang dipaksakan di halaman surat kabar tanpa manajemen redaksi dan tata letak yang tidak baik bisa mengacaukan mata dan daya serap pembaca
- 3) *Limited Coverage of Certain Groups*, sekalipun surat kabar mempunyai sirkulasi yang luas, beberapa kelompok tertentu tetap tidak dapat dilayani dengan baik (Rumanti, 2002 : 125).

#### 4. Framing Sebagai Analisis Media

Untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada masyarakat pada studi Ilmu Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* adalah sebuah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah media mengkonstruksi sebuah realitas. Analisis *framing* juga dapat dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002 : 10).

Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Pertama kali gagasan mengenai *framing* dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955, awalnya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, wacana serta realitas. Kemudian konsep ini dikembangkan lebih jauh lagi pada tahun 1974 oleh Goffman, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strip of behavior*) yang membimbing individu dalam

Ada beberapa pengertian mengenai analisis *framing* yang diaungkapkan oleh para ahli (dalam Eriyanto, 2002 : 67-68). Definisi – definisi tentang *framing* tersebut antara lain :

- a. Wiliam A. Gamson : cara bercerita atau gugusan ide – ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan – pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan – pesan yang ia terima.
- b. Robert N, Entman : proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi – informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
- c. Todd Gitlin : strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa – peristiwa ditampilkan pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
- d. Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki : strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode

informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita (Eriyanto, 2002 : 67-68).

Dari bermacam-macam definisi *framing* yang telah disampaikan oleh banyak ahli tersebut memang terdapat beberapa perbedaan di dalam hal penekanan dan pengertian, akan tetapi ada sebuah inti utama dari definisi *framing* itu sendiri. *Framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana sebuah realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh sebuah media.

Konsep *framing* sering digunakan untuk menunjukkan terjadinya proses seleksi dan penonjolan aspek realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga terdapat isu yang mendapatkan alokasi pemberitaan lebih besar daripada isu yang lain. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menonjolkan berbagai strategi wacana. Penempatan berita yang mencolok seperti menempatkan pada *headline* bagian depan atau bagian belakang, pengulangan, pemakaian grafis untuk memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.

Pada akhirnya di dalam proses *framing* akan membawa sebuah efek, karena sebuah realitas bisa dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media, bahkan

yang kompleks penuh dimensi dan tidak beraturan, disajikan dalam sebuah berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu. Berdasarkan penyederhanaan dalam kompleksnya realitas yang disajikan media akan menimbulkan efek *framing*, yaitu :

- a. Menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain. *Framing* pada umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut sebagai fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lain yang tidak mendapat perhatian yang memadai.
- b. Menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lain. Menampilkan aspek tertentu menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita.
- c. Menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lainnya. Berita juga seringkali memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu. Ini tentu saja tidak salah, tetapi efek yang segera terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi (Eriyanto, 2002 : 141).

*Framing* yang jika didominasi oleh seorang elite/penguasa, maka seorang penguasa tersebut akan mampu mengendalikan persepsi masyarakat. Jika pemberitaan didominasi oleh yang tunggal, terutama yang datang dari elite

Carragee, dan Meinhofer dalam Baran dan Davis, 2010 : 400). Maka dari itu sebuah negara sebaiknya melakukan pembatasan terhadap kepemilikan media, agar tidak terjadi konglomerasi media sehingga isi pemberitaan pada media lebih subyektif. Selain itu pada dasarnya *framing* digunakan untuk melihat bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu yang akhirnya menentukan fakta apa yang harus diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan mau dibawa kemana berita tersebut dibawa oleh wartawan sebuah media.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang analisis *framing* pemberitaan rencana penerbitan Perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Harian Kompas dan Koran Tempo.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian kali ini adalah media cetak Harian Kompas dan Koran Tempo. Perbedaan penyajian berita tentang Kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di antara kedua media tersebut menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh dan mendalam. Peneliti akan meneliti pemberitaan pada Harian Kompas dan Koran Tempo yang memberitakan tema pemberitaan yang sama yaitu rencana penerbitan perpu MK terkait kasus suap Ketua Mahkamah

Konstitusi Akil Mochtar di Harian Kompas dan Koran Tempo, seperti pada tabel

berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Obyek Penelitian**

No	Edisi	Kompas	Koran Tempo
1.	Harian Kompas edisi 8 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 7 Okt 2013	Banyak yang Tolak Perpu “Perbaiki Sistem di Mahkamah Konstitusi Lebih Tepat”	Tokoh Mahkamah Konstitusi Tolak Perpu
2.	Harian Kompas Edisi 18 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 18 Okt 2013	Perpu MK Diterbitkan “Presiden Usulkan Hakim Konstitusi Harus Jeda 7 Tahun dari Parpol”	Kerisauan Iringi Terbitnya Perpu MK
3.	Harian Kompas edisi	Pemerintah Perlu Jelaskan Dua Versi Naskah	Fraksi di DPR Terbelah Soal Perpu

	23 Okt 2013 dan Koran Tempo edisi 19 Okt 2013		
--	--	--	--

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Peneliti menggunakan media cetak Harian Kompas dan Koran Ten sebagai data primer untuk mencari data-data yang akan diteliti mengenai kontroversi Kasus Suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Moctar.

b. Data Sekunder

Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan dan mempelajari referensi lain berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan internet serta beberapa media lain yang dapat membantu penelitian ini dalam melengkapi data.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*. Analisis *framing* adalah suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh media ketika menyeleksi isu dan menuliskan berita. Pendekatan ini juga dapat melihat bagaimana suatu kejadian atau realitas



dibentuk dan dikonstruksi oleh media. *Framing* menurut Zhongdang Pan dan Kosicki merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu, kedalam teks secara keseluruhan.” (Sobur, 2001 : 174)

Didalam penelitian ini akan digunakan konsep *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki. Model *framing* yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan yang paling banyak dipakai dalam penelitian *framing* media. Model ini berasumsi bahwa semua berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide.

Dalam tulisannya Pan dan Kosicki tidak membatasi analisisnya hanya pada isi media. Tetapi bagaimana media membentuk sebuah *frame* tertentu kepada khalayak, dan bagaimana khalayak politik melakukan pemaknaan konstruksi atas peristiwa untuk disediakan pada publik. Khalayak juga akan melakukan proses dan pemaknaan yang berbeda atas suatu peristiwa.” (Eriyanto, 2002 : 252)

Dalam proses pembuatan pesan agar lebih menonjol, menempatkan informasi yang lebih menarik agar khalayak lebih tertarik di sini Zhongdang Pan dan Kosicki melihat bahwa ada dua buah konsep dari pembingkaihan yang saling berkaitan. *Pertama*, konsepsi psikologi dalam konsep ini lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. *Kedua*, konsepsi sosiologis yang melihat pada proses internal dalam diri seseorang, dan bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

Penggabungan konsep psikologi dan sosiologi dapat dilihat dari bagaimana suatu berita diproduksi dan dikonstruksi oleh wartawan atau media, disini ada tiga pihak yang saling berhubungan yaitu wartawan, sumber berita dan khalayak.

Konsep *framing* model Zhongdhang Pan dan Kosicki menggunakan elemen data lebih lengkap dibandingkan dengan model-model yang lain. Perangkat *framing* model Zhongdhang Pan dan Kosicki dibagi kedalam empat elemen besar, yaitu :

a. Struktur Sintaksis

Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau *frase* dalam sebuah kalimat. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik, yang dilimai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar, dan penutup.

Sintaksis merujuk kepada pengertian susunan bagian seperti *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, penutup dalam suatu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Sintaksis yang paling populer dikalangan wartawan dalam menyusun berita adalah struktur piramida terbalik. Struktur sintaksis berfungsi memberikan petunjuk tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak diarahkan kemana suatu berita akan dibawa. (Eriyanto, 2002 : 257)

Elemen-elemen sintaksis disini menunjukkan tentang bagaimana wartawan akan memaknai berita dan hendak dibawa kemana arah berita itu.

*Headline* merupakan aspek sintaksis yang memiliki tingkat kemenonjolan yang sangat tinggi, karena pembaca cenderung lebih mengingat *headline* yang dipakai dibandingkan dengan berita yang disajikan dihalaman lain. *Headline* juga sangat mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dapat dimengerti kemudian mereka ilustrasikan kedalam bahasa sesuai yang ingin wartawan tekankan kepada pembaca atau khalayak.

“*Lead* adalah perangkat sintaksis yang memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberikan.” (Eriyanto, 2002 : 258)

“*latar* merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan oleh wartawan” (Eriyanto, 2002 : 258).

Ketika seorang wartawan menulis sebuah berita biasanya menggunakan *latar belakang* atas peristiwa yang ditulis, hal ini menunjukkan bagaimana konstruksi itu akan dibuat dan akah dibawa kemana khalayak tersebut.

Pengutipan sumber berita merupakan bagian berita yang juga sangat penting. Penulisan pada bagian ini bermaksud untuk membangun sebuah objektivitas. Hal ini digunakan untuk membangun keseimbangan dalam suatu berita yang dikonstruksi, selain itu pengutipan sumber juga bertujuan untuk menekankan bahwa apa yang sudah ditulis oleh seorang wartawan adalah semata-mata bukan pendapat wartawan itu sendiri,

melainkan pendapat orang-orang yang memiliki otoritas tertentu

Pengutipan sumber ini menjadikan *framing* lebih kuat dan dipercaya, ada tiga hal yang membuat pengutipan sumber ini menjadikan *framing* lebih kuat dan dipercaya, yaitu :

Pertama, mengeklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Walaupun seorang wartawan mempunyai pendapat sendiri atas suatu berita, namun pendapat itu juga didukung oleh para ahli yang berkompeten. Kedua, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. Ketiga, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas, sehingga pandangan tersebut nampak sebagai penyimpangan. (Eriyanto, 2002 : 259)

b. Struktur Skrip

“Bentuk umum dari struktur skrip adalah 5W + 1H (*Who, What, Where, Why, and How*). Meskipun ini tidak selalu ditemukan di dalam sebuah berita yang ditampilkan. Namun kategori informasi ini yang diharapkan akan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan” (Eriyanto, 2001 : 260). Laporan berita yang didudun oleh wartawan dibuat sebagai sebuah cerita, hal tersebut karena dua hal. “pertama, laporan berita yang berusaha menunjukkan peristiwa lanjutan dari peristiwa yang sebelumnya. Kedua, setiap berita mempunyai orientasi untuk menghubungkan dengan lingkungan komunal pembaca.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik dapat diamati dari berbagai peristiwa yang diungkapkan atau yang dibuat oleh wartawan. "Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang digunakan dan penulisan sumber kedalam teks berita secara keseluruhan." (Eriyanto, 2002 : 262).

Didalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai sebuah tema atas suatu kejadian tertentu. Pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran seorang pembaca tentang sebuah peristiwa untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak akan kebenaran berita tersebut.

d. Struktur Retoris

Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. "Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatnya suatu penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita" (Eriyanto, 2002 : 264). Struktur retorik dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan oleh wartawan adalah sebuah kebenaran. Ada beberapa elemen struktur retorik yang biasanya digunakan oleh wartawan untuk menekankan atau menonjolkan apa yang ingin dia sampaikan.

“Leksion adalah pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa” (Eriyanto, 2002 : 265). Pilihan yang dipakai oleh wartawan tidak semata-mata karena sebuah kebetulan, akan tetapi secara ideologis menunjukkan bahwa bagaimana sebuah pemaknaan seorang terhadap sebuah realitas.

“Selain melalui kata penekanan, pesan dalam berita juga dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah unsur grafis, dalam berita grafis ini biasanya muncul melalui bagian tulisan yang dibuat lain dari tulisan yang lain” (Eriyanto, 2002 : 266). Elemen grafis juga dapat muncul dalam bentuk foto, gambar, dan tabel untuk mendukung gagasan atau bagian yang tidak ingin ditonjolkan.

Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki membuat skema *framing* yang lebih dikenal dengan nama skema *framing* model Pan dan Kosicki. Skema tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

framing model Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5 W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud 5. Nominalisasi 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafora 12. pengandaian	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik

Sumber: Nugroho, Eriyanto, Sudiarsis, Politik Media Mengemas Berita (2002 : 256)

## 5. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, peneliti akan membagi ke dalam empat bab, dimana bab I menjelaskan bagaimana kedua media cetak (Harian Kompas dan Koran Tempo) dalam menulis berita yang berkaitan dengan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dalam bab I ini peneliti juga menguraikan hal yang menarik dari pemberitaan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Harian Kompas dan Koran Tempo yang kemudian menarik peneliti untuk menjadikannya sebagai objek penelitian. Berbagai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini juga terdapat di bab I ini. Dalam bab I juga terdapat metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menganalisis berita kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Pada bagian bab II peneliti menuliskan profil media yang menjadi objek penelitian, yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo. Selain itu di dalam bab II ini peneliti juga akan menuliskan sejarah berdirinya kedua media tersebut sampai perkembangannya.

Kemudian dalam bab III penelitian ini akan menjelaskan analisa data yang bahannya diperoleh dari kedua media cetak tersebut berupa berita yang berkaitan dengan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Pada analisis data ini, peneliti menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana kedua media cetak tersebut mengkonstruksi peristiwa atau kejadian yang kemudian



Skripsi ini diakhiri pada bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan, penelitian ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh oleh peneliti, kemudian pada sub bab saran, peneliti akan berusaha memberikan alternatif penelitian kepada media tersebut dan membahas penelitian ini